

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKIP)  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya semata, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan salah satu cara perbaikan kinerja organisasi yang harus dilakukan untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini disusun sebagai bentuk/media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan dan kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selama tahun anggaran 2025. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang agar semakin baik dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan pembangunan dibidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten Lampung Timur.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 ini belum sempurna. Untuk itu, dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan masukan dan saran guna perbaikan dalam kinerja maupun dalam penyusunan laporan ini di masa mendatang.

Semoga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat bermanfaat sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Sukadana, 28 Januari 2025

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



MANSUR SYAH, S.Sos., M.I.P.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 200003 1 006

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	iii
I. PENDAHULUAN .....	1
1.1 Maksud dan Tujuan.....	1
1.2 Ruang Lingkup .....	1
1.3 Gambaran Umum.....	1
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Lampung Timur.....	1
1.3.2 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi Dan Informatika.....	2
1.4 Identifikasi Permasalahan .....	4
1.5 Penentuan Isu-isu Strategis .....	4
II. PERENCANAAN KINERJA .....	6
2.1 Rencana Strategis .....	6
2.2 Perencanaan Kinerja .....	7
III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	12
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	13
A.1. Pencapaian Kinerja.....	13
A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja.....	14
A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode..... RPJMD/Renstra	16
A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi..... Nasional	17
A.5. Analisa Penyebab Keberhasilan yang telah dilakukan.....	18
A.6. Analisa Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	26
A.7. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang..... Keberhasilan ataupun Pencapaian Kinerja	27
B. Realisasi Anggaran .....	30
IV. PENUTUP .....	40
LAMPIRAN	
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja 2025	



## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparatur pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Berkaitan dengan misi Kepala Daerah terpilih, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mendapatkan amanah untuk menjalankan Misi 6 (enam) yaitu : Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab. Misi tersebut untuk Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang komunikasi dan informatika.

Analisis akuntabilitas kinerja dilakukan terhadap indikator kinerja utama dinas, dengan didukung 5 (lima) program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 48 (empat puluh delapan) sub kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, secara umum dapat dikatakan berhasil dengan baik dengan capaian indikator kinerja sasaran pada tahun 2025.

Penyusunan LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan serta agar dapat mendorong aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk selalu meningkatkan kinerjanya, sehingga pencapaian tujuan dapat efektif dan efisien.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini adalah sebagai wujud atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur. Dari Laporan LKjIP ini diharapkan dapat diperoleh suatu kesimpulan pencapaian kinerja atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025, serta dapat dipergunakan sebagai masukan dan perbaikan dalam rangka peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

#### **1.2 Ruang Lingkup**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mencakup pelaksanaan program, kegiatan dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 (Periode Januari s.d Desember 2025) yang merupakan kinerja tahun ketiga dari Rencana Strategik (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021 - 2026.

#### **1.3 Gambaran Umum**

##### **1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur**

Sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika serta persandian berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Sedangkan fungsi dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur adalah :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah;



- 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi, layanan infra struktur dasar data center, disaster recovery center dan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
- 3) Pelayanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan manajemen data dan informasi *e-Government*, intergarsi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi *e-Government*, layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah kabupaten/kota, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik dan spesifik dan suplemen yang terintegrasi, penyelenggaraan ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) *Smart City*, layanan nama domain dan subdomain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan.
- 4) Pelayanan Publik *Government Chief Information Officer* (GCIO) pemerintah kabupaten/kota, pengembangan sumber daya TIK pemerintah daerah dan masyarakat, persandian dan statistik sektoral lingkup Kabupaten Lampung Timur.
- 5) Pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup pemerintah daerah.
- 6) Pelaksanaan pengelolaan barang inventaris yang menjadi tanggung jawab dinas;
- 7) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

### 1.3.2. Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika

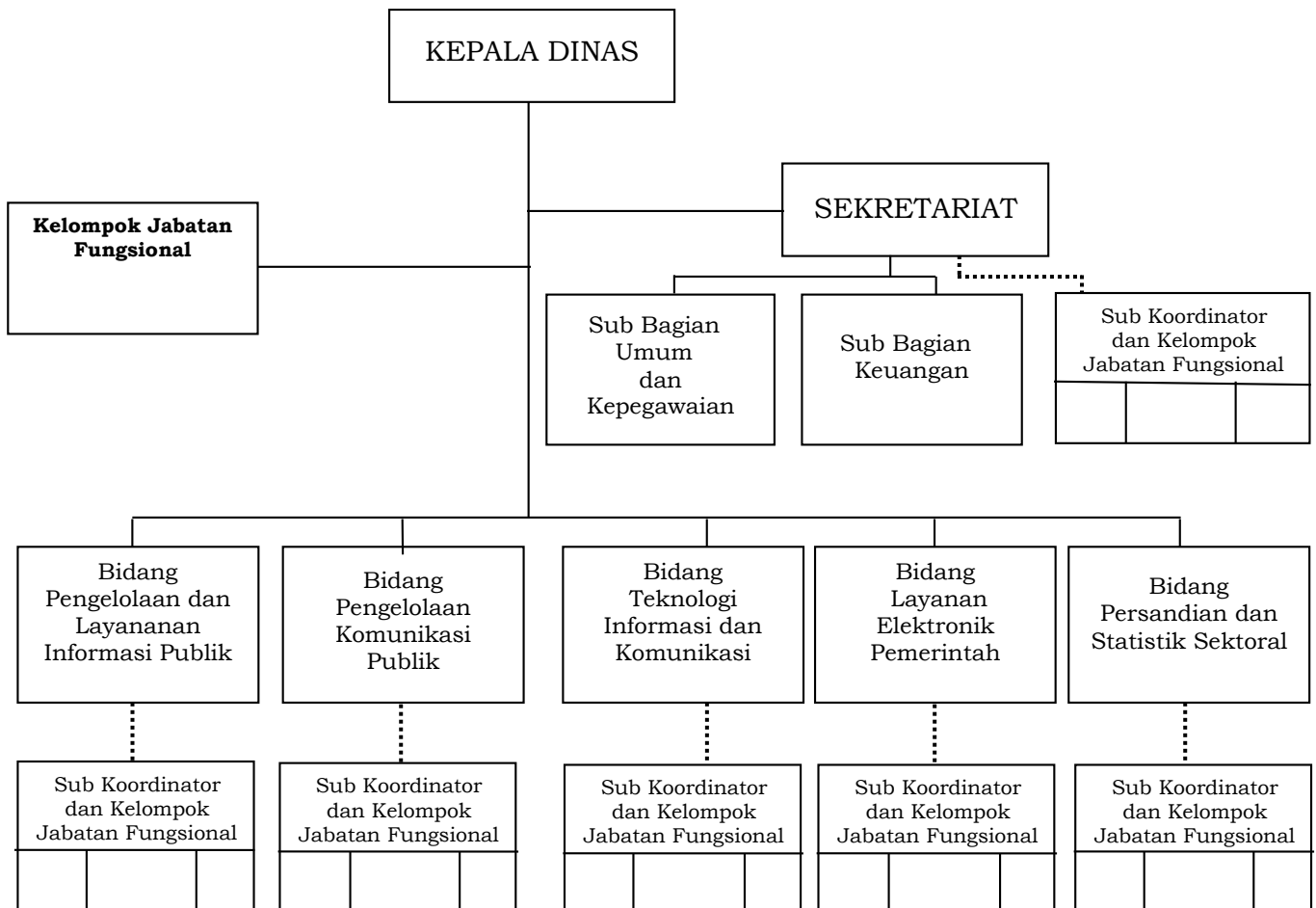
Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris :
  - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - Sub Bagian Keuangan
- c. Bidang Pengelolaan Informasi Publik :
- d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik :



- e. Bidang Tehnologi Informasi dan Komunikasi :
- f. Bidang Layanan Elektronik Pemerintahan :
- g. Bidang Persandian dan Statistik Sektoral :
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

**BERIKUT ADALAH BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**





#### **1.4 Identifikasi Permasalahan**

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai instansi teknis dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Komunikasi, dan Informatika mengalami permasalahan-permasalahan antara lain :

- a. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- b. Kurangnya sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas-tugas peliputan.
- c. Rendahnya Sumberdaya Manusia Dinas Komunikasi dan Informatika yang menguasai teknologi informasi sehingga diperlukan kerjasama dengan daerah lain dalam rangka Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur.

#### **1.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

- a. Peningkatan Komitmen dan Implementasi e-government Pemerintah kabupaten Lampung Timur
- b. Meningkatkan pelayanan akses internet di seluruh Perangkat Daerah, maka untuk kedepan perlu penambahan anggaran agar akses internet dapat berjalan dengan baik.
- c. Perlunya penguatan infrastruktur jaringan dalam upaya meningkatkan pelayanan koneksi internet di seluruh Perangkat Daerah agar koneksi internet dapat berjalan dengan baik.
- d. Perlunya ketersediaan sarana dan prasarana yang ada untuk kegiatan peliputan pada Dinas Komunikasi dan Informatika, maka untuk kedepan harus diupayakan dalam penganggarannya.
- e. Pembentukan dan pemberdayaan masyarakat informatif melalui penyebaran ,penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, dengan mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat akses oleh masyarakat secara mudah.
- f. Pembentukan komunikasi informasi masyarakat yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggung jawab.
- g. Menjamin ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas dan diakses secara mudah dan cepat.



- h. Peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur yang menguasai teknologi informasi secara berkala dan berkelanjutan.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1 RENCANA STRATEGIS

Perencanaan Strategis adalah proses berkelanjutan dan sistematis dari pembuatan keputusan yang beresiko, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi. Komponen Perencanaan Strategis meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen Perencanaan Strategis tersebut telah dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun 2021-2026.

Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur dalam melaksanakan Pembangunan Tahun 2021 – 2026, yaitu **“Rakyat Lampung Timur Berjaya”**.

Misi :

- 1). Meningkatkan Program Petani Berjaya
- 2). Peningkatan pembangunan infra struktur multi sektor berbasis pedesaan
- 3). Peningkatan kualitas SDM yang sehat, cerdas, dan berkarakter melalui pelayanan kesehatan, pendidikan, keagamaan dan sosial kemasyarakatan.
- 4). Meningkatkan peran koperasi, UMKM, BUMDes, BUMD, Lembaga Keuangan lainnya dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat agar berdaya saing dengan berbasis pada ekonomi lokal.
- 5). Meningkatkan pendidikan politik dan kesadaran hukum masyarakat.
- 6). Meningkatkan good governance (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.
- 7). Menciptakan peluang usaha dan investasi multi sektor.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung mempunyai tanggung jawab dalam mewujudkan Misi ke 6 Kabupaten Lampung Timur, yaitu : Meningkatkan *good governance* (tata kelola pemerintahan) yang bertanggung jawab.

## 2.2 PERENCANAAN KINERJA

### 1. Indikator Kinerja Utama Dinas

Perencanaan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2025 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan merupakan parameter untuk menilai keberhasilan pencapaian target dan sasaran strategis dinas. Indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika berupaya untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Berikut ini adalah indikator kinerja utama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur :

No	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	Formulasi Perhitungan
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Indeks	<p>Indeks SPBE dihitung berdasarkan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.</p> <p>Indeks yang mempresentasikan tingkat terlaksananya SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari perhitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain</p> <p style="text-align: center;"><b>INDEKS SPBE = NDj X BDj</b></p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- NDj = Nilai Indeks Domain ke-j</li> <li>- BDj = Bobot Domain ke-j</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>INDEKS DOMAIN = <math>\frac{1}{BD_i} \sum NA_i \times BA_i</math></b></p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>BD_i</math> = Bobot Domain ke-i</li> <li>- <math>NA_i</math> = Nilai Indeks Aspek ke-i</li> <li>- <math>BA_i</math> = Bobot Aspek ke-i</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>INDEKS ASPEK = <math>\frac{1}{BA_k} \sum NI_k \times BI_k</math></b></p> <p>Keterangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>BA_k</math> = Nilai Bobot ke-k</li> </ul>



				<ul style="list-style-type: none"> <li>- <math>NI_k</math> = Nilai Tingkat Kematangan indikator ke-k</li> <li>- <math>BI_k</math> = Nilai Bobot Indikator ke-k</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Predikat Indeks SPBE</b></p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Nilai Indeks</th> <th>Predikat</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3,5 – 4,2</td> <td>Sangat baik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2,6 – 3,5</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1,8 – 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td></td> <td>&lt; 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	No	Nilai Indeks	Predikat		4,2 – 5,0	Memuaskan		3,5 – 4,2	Sangat baik		2,6 – 3,5	Baik		1,8 – 2,6	Cukup		< 1,8	Kurang
No	Nilai Indeks	Predikat																				
	4,2 – 5,0	Memuaskan																				
	3,5 – 4,2	Sangat baik																				
	2,6 – 3,5	Baik																				
	1,8 – 2,6	Cukup																				
	< 1,8	Kurang																				
		<b>Indeks Keterbukaan Informasi Publik</b>	<b>Indeks</b>	<p>Indeks Keterbukaan Informasi Publik dihitung berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.</p> <p>Penetapan Kategori Badan Publik berdasarkan akumulasi penilaian dari tahapan Kuisisioner, Verifikasi Data dan Presentasi dengan formula :</p> $\left[ \frac{\text{Nilai Kuisisioner} + \text{Nilai Verifikasi}}{2} \times 80\% \right] + [\text{Nilai Presentasi} \times 20\%] = \text{Nilai Kategori}$ <p>Nilai Kategori adalah skor yang diperoleh Badan Publik sebagai dasar pemetaan kategori keterbukaan informasi publik yaitu :</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Skor</th> <th>Kategori</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>90 – 100</td> <td>Informatif</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>80 – 89,9</td> <td>Menuju Informatif</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>60 – 79,9</td> <td>Cukup Informatif</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>40 – 59,9</td> <td>Kurang Informatif</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>&lt; 39,9</td> <td>Tidak Informatif</td> </tr> </tbody> </table>	No	Skor	Kategori	1	90 – 100	Informatif	2	80 – 89,9	Menuju Informatif	3	60 – 79,9	Cukup Informatif	4	40 – 59,9	Kurang Informatif	5	< 39,9	Tidak Informatif
No	Skor	Kategori																				
1	90 – 100	Informatif																				
2	80 – 89,9	Menuju Informatif																				
3	60 – 79,9	Cukup Informatif																				
4	40 – 59,9	Kurang Informatif																				
5	< 39,9	Tidak Informatif																				
		<b>Indeks Pembangunan Statistik (IPS)</b>	<b>Indeks</b>	Indeks Pembangunan Statistik dilakukan penghitungan berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.																		

				<p>Nilai Indeks Pembangunan Statistik merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral secara keseluruhan. Nilai Indeks Pembangunan Statistik dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks pembangunan statistik dijabarkan sebagai berikut :</p> $\text{Indeks Pembangunan Statistik} = \sum_{k=1}^k \text{Bobot Domain}_k \times \text{Nilai Domain}_k$ <p>Dengan :</p> <p>K adalah banyaknya domain penilaian; Bobot Domain k adalah nilai bobot domain ke-k; Nilai Domain k adalah nilai indeks domain ke-k;</p> <p>Nilai indeks diberikan predikat yang mempresentasikan tingkat kematangan pembangunan statistik dan penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan pengelompokan berdasarkan kategori berikut :</p> <p style="text-align: center;"><b>Predikat Penilaian Tingkat Kematangan IPS</b></p> <table border="1"><thead><tr><th>No</th><th>Nilai Indeks</th><th>Predikat</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td></td><td>3,5 – 4,2</td><td>Sangat baik</td></tr><tr><td></td><td>2,6 – 3,5</td><td>Baik</td></tr><tr><td></td><td>1,8 – 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td></td><td>&lt; 1,8</td><td>Kurang</td></tr></tbody></table>	No	Nilai Indeks	Predikat		4,2 – 5,0	Memuaskan		3,5 – 4,2	Sangat baik		2,6 – 3,5	Baik		1,8 – 2,6	Cukup		< 1,8	Kurang
No	Nilai Indeks	Predikat																				
	4,2 – 5,0	Memuaskan																				
	3,5 – 4,2	Sangat baik																				
	2,6 – 3,5	Baik																				
	1,8 – 2,6	Cukup																				
	< 1,8	Kurang																				

## 2. Perjanjian Kinerja Dinas

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil maka Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pihak pertama mengadakan perjanjian kinerja dengan Bupati Lampung Timur sebagai pihak kedua. Perjanjian tersebut berisikan tentang bagaimana pihak pertama akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini. Dalam rangka mencapai dan mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan dalam hal pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.



Selanjutnya pihak kedua akan melakukan supervisi sesuai yang diperlukan selanjutnya pihak kedua akan melakukan evaluasi terhadap hasil capaian kinerja dari pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Apabila terjadi sesuatu kejadian maka pihak kedua akan mengambil keputusan untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi kepada pihak kedua.

Perjanjian ini dimaksudkan sebagai arahan dan tolak ukur pertanggungjawaban keberhasilan / kegagalan dan pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur dalam penyelenggaraan Pemerintah dan Pembangunan di Bidang Komunikasi dan Informatika di Wilayah Kabupaten Lampung Timur. Berikut adalah perjanjian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 yang dibuat di awal tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA  
DINAS KOMNIKASI DAN INFORMATIKA  
TAHUN 2025**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE (Nilai Domain Layanan SPBE)	2,8
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Cukup (60)
		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik 2,8

	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	Rp. 5.132.502.861,-	APBD
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 2.797.508.242,-	APBD
3.	Program Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp. 2.923.572.937,-	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.	Rp. 186.521.395,-	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.	Rp. 139.109.066,-	APBD



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.pemberi amanah. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 54 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur, tercermin dari berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2024. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

### A.1. PENCAPAIAN KINERJA

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur**  
**Tahun 2025**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Baik 2,8	Baik 2,8	100%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif 60	Kurang Informatif 48,5	80,8%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik 2,8	Baik 2,8	100%

Dari tabel pengukuran diatas dapat dilihat bahwa pada Sasaran Kinerja 1 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Indeks SPBE terealisasi sebesar 2.8 dari target 2.8 dengan capaian 100%.

Sasaran Kinerja 2 yaitu Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dengan Indikator Indeks keterbukaan Informasi Publik terealisasi sebesar 48,5 dari target 60 dengan capaian 80,8%.

Sasaran Kinerja 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Statistik Sektoral dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan target 2,8 (Baik) dengan realisasi 2,8 (baik) dengan capaian 100%.

## A.2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA

- Perbandingan Tahun 2025 dengan Tahun Lalu

**Tabel 3.2**  
**Pencapaian Sasaran 1**  
**Capaian Indikator Kinerja : Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)**

Sasaran 1					
Sasaran 1			Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik		
IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
Satuan			Indeks		
2024			2025		
Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2,6	2,8	107,7%	2,8	2,8	100%

Dari tabel yang membandingkan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa realisasi pada Sasaran Kinerja 1 yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan Indikator Indeks SPBE pada Tahun 2025 mampu mempertahankan target realisasi dari tahun 2024.

**Tabel 3.3**  
**Pencapaian Sasaran 2**  
**Capaian Indikator Kinerja : Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)**

<b>Sasaran 2</b>					
<b>Sasaran 2</b>			Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik		
<b>IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur</b>			Indeks Keterbukaan Informasi Publik		
<b>Satuan</b>			Indeks		
<b>2024</b>			<b>2025</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
60	53,65	0%	60	48,5	88,8%

Dari tabel yang membandingkan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa realisasi pada Sasaran Kinerja 2 yaitu Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2025 mengalami fluktuasi yang dinamis dari tahun 2024.

**Tabel 3.4**  
**Pencapaian Sasaran 3**  
**Capaian Indikator Kinerja : Meningkatkan Kualitas Statistik Sektoral**

<b>Sasaran 3</b>					
<b>Sasaran 3</b>			Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral		
<b>IKU Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur</b>			Indeks Pembangunan Statistik (IPS)		
<b>Satuan</b>			IndeksIndeks		
<b>2024</b>			<b>2025</b>		
<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
2,8	2,8	58,5%	2,8	2,8	100%

Dari tabel yang membandingkan tahun 2025 dengan tahun sebelumnya dapat dilihat bahwa realisasi pada Sasaran Kinerja 3 yaitu Meningkatkan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada Tahun 2025 mampu mempertahankan target dari tahun 2024.

### A.3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S/D AKHIR PERIODE RPJMD/RENSTRA

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur**  
**Tahun 2025 s/d akhir periode RPJMD/RENSTRA**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	Capaian
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Baik 2,8	Baik 2,8	3	93,3%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif 60	Kurang Informatif 48,5	79	61,4%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik 2,8	Baik 2,8	3	93,3%

Dari tabel yang membandingkan tahun 2025 dengan akhir periode RPJMD/RENSTRA dapat dilihat bahwa pada Indikator kinerja ke-1 dengan indikator Indeks SPBE tercapai 2,8 dengan target akhir periode RPJMD/RENSTRA 3 dengan capaian 93,3 %,.

Indikator kinerja ke-2 dengan indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik tercapai 44,9 dengan dengan target akhir periode RPJMD/RENSTRA 79 dengan capaian 61,4%.

Indikator kinerja ke-3 dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik tercapai 2,8 dengan target akhir periode RPJMD/RENSTRA 3 dengan capaian 93,3%.

#### A.4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN REALISASI NASIONAL

Sasaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur apabila dibandingkan dengan sasaran yang ada pada Kementerian Kominfo terlihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 3.6**  
**Perbandingan Realisasi Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur**  
**Tahun 2025 dengan Realisasi Nasional**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2025		Capaian
			Diskominfo	Nasional	
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Baik 2,8	Baik 3,12	89,74%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Kurang Informatif 48,5	Cukup Informatif 75,65	64,11%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik 2,78	Baik 2,87	96,86%

Target Kabupaten Lampung Timur di Bidang Komunikasi dan Informatika yaitu Indeks SPBE minimal baik, pada tahun 2025 nilai SPBE Kabupaten Lampung Timur adalah 2,8. Apabila dibandingkan dengan pencapaian instansi pusat yang mencapai Indeks 3,12 kabupaten Lampung Timur sudah hampir mendekati targetnya yaitu dengan realiasi Indeks SPBE 2,8 dengan capaian 89,74%.

Target Kabupaten Lampung Timur di Bidang Keterbukaan Informasi Publik yaitu Keterbukaan Informasi Publik minimal cukup, pada tahun 2025 nilai Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Lampung Timur adalah 48,5 . Apabila dibandingkan dengan pencapaian instansi pusat yang mencapai nilai 75,65. Kabupaten Lampung Timur sudah hampir mendekati targetnya yaitu dengan realiasi Indeks Keterbukaan Informasi Publik 48,5 dengan capaian 64,11%.

Target Kabupaten Lampung Timur di Bidang Pembangunan Statistik yaitu Pembangunan Statistik minimal baik, pada tahun 2025 nilai Pembangunan Statistik Kabupaten Lampung Timur adalah 2,78. Apabila dibandingkan dengan pencapaian instansi pusat yang mencapai Indeks 2,87 kabupaten Lampung Timur sudah hampir mendekati targetnya yaitu dengan realiasi Indeks SPBE 2,78 dengan capaian 96,86%.

#### **A.5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN YANG TELAH DILAKUKAN**

Realisasi sasaran 1 pada Indikator 1 yaitu Indeks SPBE tahun 2025 mampu mempertahankan target dengan realisasi sebesar 2,8 dari target sebesar 2,8 dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini dikarenakan :

1. Domain Kebijakan SPBE

Telah disahkannya Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Timur nomor 16 tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Perbasis Elektronik (SPBE), serta telah dilakukannya review atas kebijakan tersebut, sehingga mengalami peningkatan pada domain kebijakan.

2. Domain Tata Kelola SPBE

Penerapan pada Domain Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi dengan adanya Kebijakan Internal berupa Surat Keputusan Nomor B.236/14-SK/2024 yang Peta Rencana SPBE dan Arsitektur SPBE yang mencakup 3 unsur dari 6 arsitektur meliputi arsitektur proses bisnis, layanan, serta data dan informasi.

3. Domain Manajemen SPBE

Penerapan Manajemen SPBE mengalami kenaikan pada Manajemen Data dengan adanya Kolaborasi Penerapan Manajemen Data SPBE telah dijalankan melalui forum satu data yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan kerja sama dengan pihak eksternal seperti Badan Pusat Statistik (BPS)

#### 4. Domain Layanan SPBE

Penerapan Layanan SPBE telah mengimplemetasikan aplikasi SRIKANDI sebagai Layanan Kearsipan Dinamis memungkinkan unggah dokumen, pencarian, persetujuan surat, dan pengolahan informasi secara elektronik. Serta mengimplemetasikan aplikasi e-Kinerja yang digunakan untuk Layanan Kinerja Pegawai, memberikan fitur penilaian kinerja, analitik, dan integrasi dengan SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara), yang membantu meningkatkan pengelolaan kinerja pegawai dengan lebih transparan dan efisien.

Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Lampung Timur bertahan di nilai 2,8 pada tahun 2024 menjadi 2,8 pada tahun 2025 dikarenakan berdasarkan Surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : B/66/PD.02/2025 tanggal 21 April 2025 perihal Pembinaan kepada instansi pemerintah pada Tahun 2025 dalam rangka Penerapan Kebijakan Pemerintah Digital sebagai Penguatan Kebijakan SPBE, maka pada tahun 2025, pengukuran Indeks SPBE mengalami **masa transisi** menyusul adanya kebijakan transformasi digital nasional. Fokus evaluasi sedang dikalibrasi ulang oleh Pemerintah Pusat untuk bertransisi menuju instrumen **Indeks Pemerintah Digital (IPD)** yang akan diimplementasikan secara penuh pada tahun 2026. Oleh karena itu, capaian kinerja tahun 2025 diukur melalui parameter kesiapan transisi sistem dan integrasi layanan

- Permasalahan untuk mencapai indikator Indeks SPBE :
  - a. Kebijakan Tata Kelola SPBE Kabupaten Lampung Timur sesuai Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum memuat uraian atau muatan secara lengkap.
  - b. Tata Kelola SPBE terkait arsitektur SPBE terkait arsitektur dan peta rencana SPBE masih belum memuat seluruh cakupan domain arsitektur.
  - c. Penerapan manajemen SPBE belum adanya peta rencana yang memuat seluruh cakupan manajemen SPBE.
  - d. Layanan SPBE belum maksimal fitur dalam aplikasi satu data dan belum adanya aplikasi yang dikhususkan dalam pengawasan internal pemerintah (whistleblowsystem).

- e. Kurangnya anggaran dalam setiap penyelenggaraan pembangunan dibidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang selama ini masih menjadi salah satu penyebab e-Government seperti jalan ditempat dan belum dapat memberikan pelayanan internet dan intranet secara optimal.
- f. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dibidang Jaringan Internet dan Intranet, Programmer, Database Website serta Statistik dan Persandian.

➤ Solusi :

- a. Menyusun Regulasi terkait SPBE yaitu akan dibuat draft kebijakan/pedoman turunan dari Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik.
- b. Menyusun regulasi tentang Pedoman mengenai arsitektur SPBE yang memuat seluruh cakupan domain SPBE (proses bisnis, layanan data dan informasi, aplikasi infrastruktur, dan keamanan).
- c. Menyusun Regulasi Pedoman Peta Rencana yang memuat peta rencana yang terstruktur.
- d. Memaksimalkan fitur approval atau verifikasi pada aplikasi satu data lampung timur serta merancang sistem pengawasan internal pemerintah (whistleblowsystem).
- e. Mengajukan dan mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada APBD Tahun 2025.
- f. Merekrut Sumber Daya Manusia sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan dan menugaskan SDM yang ada untuk mengikuti diklat-diklat, workshop dan sejenisnya, khususnya dalam bidang komunikasi dan informasi.
- g. Integrasi Jaringan SPBE dan Penguatan infratsuktur jaringan internet dan intranet Lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Timur pada semua Perangkat Daerah dan Kecamatan.

Realisasi sasaran 2 pada Indikator 2 yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2025 mengalami fluktuasi yang dinamis dari Tahun 2024 dengan realisasi sebesar 48,5 dari target 60 dengan persentase capaian sebesar 59,35%. Hal ini dikarenakan adanya penyesuaian terhadap dinamika lingkungan strategis pada tahun 2025 :

- Permasalahan untuk mencapai indikator Indeks Keterbukaan Informasi Publik :
  - a. Masih adanya Budaya Tertutup  
Masih adanya pola pikir “rahasia jabatan” di kalangan ASN. Banyak Perangkat Daerah yang merasa enggan atau takut memberikan data kepada PPID Utama (Diskominfo) karena khawatir disalahgunakan atau mengungkap kekurangan kinerja.
  - b. Minimnya Komitmen Pemerintah Daerah  
Tidak ada kebijakan atau aturan yang jelas terkait keterbukaan informasi publik di tingkat kabupaten.
  - c. Kurangnya Infrastruktur: Kabupaten Lampung Timur mungkin belum memiliki sistem atau platform yang memadai untuk mengelola dan menyebarkan informasi publik secara transparan.
  - d. Kurangnya Sumber Daya Manusia SDM terlatih atau belum memahami pentingnya keterbukaan informasi publik dan tanggung jawab mereka.
  - e. Pengelolaan data dan informasi tidak maksimal karena banyak Perangkat Daerah tidak tertib mengirimkan pembaharuan data secara berkala ke Diskominfo. Akibatnya, informasi yang tersedia di situs web sering klai kadaluwarsa
  - f. Tidak Ada Proses Monitoring dan Evaluasi yang Efektif  
Keterbukaan informasi publik kurang dievaluasi, dan tidak ada mekanisme untuk memastikan bahwa informasi dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.
  
- Solusi :
  - a. Memfasilitasi pelaksanaan **Uji Konsekuensi**  
Diskominfo memfasilitasi pelaksanaan **Uji Konsekuensi** secara kolektif untuk menetapkan secara tertulis mana data yang "Dikecualikan" berdasarkan UU KIP No. 14/2008 yang ditandatangani Bupati/Sekda, sehingga ASN akan merasa aman.

Mereka memiliki dasar hukum untuk menolak data yang memang rahasia dan **tidak perlu takut** memberikan data yang sudah dinyatakan terbuka.

b. Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Pemerintah Daerah telah mengeluarkan kebijakan atau peraturan terkait keterbukaan informasi yang jelas, seperti Peraturan Bupati yang mengatur tentang pengelolaan informasi publik.

c. Pengembangan Infrastruktur Digital

Pemerintah kabupaten mungkin telah meluncurkan platform digital seperti website resmi pemerintah atau portal informasi publik yang menyediakan data dan dokumen yang relevan untuk diakses oleh masyarakat.

Mengintegrasikan sistem e-Government atau sistem manajemen informasi publik yang mempermudah penyampaian informasi.

d. Peningkatan SDM dan Pelatihan

Pemberian pelatihan kepada aparatur pemerintah dan PPID mengenai pentingnya keterbukaan informasi, standar layanan informasi, serta teknologi informasi yang digunakan.

e. Mengukur Kinerja Secara Berkelanjutan

Melakukan evaluasi dan audit secara berkala terhadap sistem pengelolaan informasi publik. Ini bisa membantu mengidentifikasi area yang masih kurang dan memperbaikinya dengan cepat.

Realisasi sasaran 3 pada indikator 3 yaitu Indeks Pembangunan Statistik, tahun 2025 mampu mempertahankan target dengan realisasi sebesar 2,8 dari target 2,8 dengan persentase capaian sebesar 100% hal ini dikarenakan berdasarkan Peraturan BPS nomor 3 tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS), bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral adalah suatu proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan validasi informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

Kemudian dijelaskan dalam pasal 7 bahwa Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Sehubungan dengan hal tersebut maka pada tahun 2025 pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral tidak dilaksanakan mengingat pada tahun 2024 sudah dilaksanakan dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah memperoleh nilai 2,78 dengan kategori Baik.

Meskipun begitu, rangkaian pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral pada tahun 2026 telah dilaksanakan sejak tahun 2025, Dimana pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mengidentifikasi kegiatan statistik untuk dijadikan sampel penilaian. Terdapat 5 kandidat kegiatan statistik sektoral yang akan dijadikan sampel penilaian untuk EPSS 2026 diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Survey Kepuasan Masyarakat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur;
2. Rekapitulasi Data Realisasi Investasi Kabupaten Lampung Timur milik Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Timur;
3. Kompilasi Profil Kesehatan Kabupaten Lampung Timur milik Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur;
4. Kompilasi Data Rumah Tangga Perikanan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur;
5. Kompilasi Data Produksi Peternakan pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Lampung Timur;

Selain ini, untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia sebagai bagian dari domain penilaian EPSS Forum Satu Data Indonesia telah melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Bappeda Kabupaten Lampung Timur selaku Sekretariat Forum SDI telah menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Timur tahun 2025-2029;
2. Bappeda Kabupaten Lampung Timur selaku sekretariat Forum SDI juga telah melaksanakan rapat koordinasi forum SDI kabupaten Lampung Timur pada bulan desember 2025;

3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selaku walidata telah melakukan identifikasi kebutuhan data statistik sektoral untuk dijadikan daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun 2026;
4. BPS Kabupaten Lampung Timur telah melakukan pembinaan statistik sektoral kepada Produsen Data se Kabupaten Lampung Timur pada bulan Mei 2025 sesuai dengan tugasnya sebagai Pembina data statistik.

Beberapa pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan beberapa Langkah-langkah yang di lakukan untuk mendukung serta meningkatkan pelaksanaan EPSS pada tahun 2026 mengingat bahwa pelaksanaan penilaian EPSS 2026 data yang dinilai adalah data pada tahun n-1 yaitu tahun 2025.

Nilai Indeks Pembangunan Sttistik didukung oleh :

1. Peningkatan di Domain Prinsip Satu Data Indonesia
  2. Perbaikan pada Domain Kualitas Data
  3. Penyempurnaan Proses Bisnis Statistik
  4. Penguatan Kelembagan (pengorganisasian statistik, profesionalitas, dan pengelolaan sumber daya manusia yang memadai dan kapabel).
- Permasalahan untuk mencapai indicator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) :
- a. Kebijakan yang mengatur tentang Satu Data Indonesia dan Penyelenggaraan Satu Data Indonesia sudah dibuat namun turunan dari dokumen kebijakan tersebut yang membahas tentang teknis pelaksanaan Satu Data dan Kegiatan Statistik belum di susun secara detil dan menyeluruh sehingga hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan EPSS karena belum ada prosedur teknis yang baku dan menyeluruh dalam pelaksanaan poin-poin di kegiatan EPSS.
  - b. Produsen Data belum optimal dalam mengolah data sehingga data yang tekumpul belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
  - c. Kurangnya monitoring dan evaluasi berkala, yang selama ini masih menjadi salah satu penyebab kurang optimalnya penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Lampung Timur.

- d. Kurangnya Kompetensi Sumber Daya Aparatur baik secara kuantitas maupun kualitas dibidang statistik.
- e. Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan evaluasi, yang selama ini masih menjadi salah satu penyebab pelaksanaan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia belum optimal.

➤ Solusi :

- a. Menyusun kebijakan tentang dokumen turunan dari dokumen kebijakan seperti SOP teknis pelaksanaan kegiatan statistik, petunjuk teknis atau buku pedoman penyelenggaraan statistik sektoral yang menyeluruh.
- b. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi antar lembaga, baik antara produsen data, walidata, sekretariat forum maupun dengan pembina data sehingga diperoleh hubungan yang baik dan sinergis serta dapat mengetahui kendala yang dihadapi oleh masing-masing instansi dan dapat mencari solusi secara bersama-sama.
- c. Meningkatkan monitoring dan evaluasi melalui melaksanakan rapat koordinasi Forum SDI Se-Kabupaten Lampung Timur secara berkala.
- d. Menugaskan SDM yang ada untuk mengikuti diklat-diklat, workshop dan sejenisnya, khususnya dalam bidang statistik.
- e. Mengajukan dan mengalokasikan anggaran untuk mengoptimalkan kualitas penyelenggaraan SDI di Kabupaten Lampung Timur.

## A.6. ANALISA ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

**Tabel 3.7**  
**Analisa Atas Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	100%	92,5%	7,5%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80,8%	98,6%	-17,8%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektor	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100%	92,7%	7,3%

Dari tabel efisiensi penggunaan sumber daya dapat dilihat pada :

1. Indikator kinerja 1 yaitu Indeks SPBE tingkat efisiensi sebesar 7,5% karena prosentase capaian kinerja yaitu 100% sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 92,5%.
2. Indikator kinerja 2 yaitu Indeks Keterbukaan Informasi Publik tingkat efisiensi sebesar -17,8% karena prosentase capaian kinerja kurang dari 100% yaitu 80,8% sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 98,6%.
3. Indikator kinerja 3 yaitu Indeks Pembangunan Statistik tingkat efisiensi sebesar 7,5% karena capaian kinerja mencapai 100% sedangkan prosentase capaian anggaran dibawah 100% yaitu 92,7%.

**A.7. ANALISA PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN  
PENCAPAIAN KINERJA**

**Tabel 3.8**  
**Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja**

No	Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	Program/Kegiatan Yang Menunjang
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	100%	Program Aplikasi dan Informatika
				Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Lingkup Kabupaten
				Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan daerah
				Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah
				Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah
				Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	80,8%	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
				Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah
				Monitoring Opini dan Aspirasi Publik
				Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
				Pengelolaan Media Komunikasi Publik
				Pelayanan Informasi Publik
Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan				
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	100%	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
				Membangun Metadata Statistik Sektoral

## A.8. ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PENYESUAIAN PADA MASA TRANSISI RPJMD

**Tabel 3.9**  
**Capaian Kinerja Penyesuaian Perencanaan Pada Masa Transisi RPJMD**

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)
1.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	Baik 2,8	Baik 2,8	100%
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Cukup Informatif 60	Kurang Informatif 48,5	80,8%
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik 2,8	Baik 2,8	100%

Realisasi sasaran 1 pada Indikator 1 yaitu Indeks SPBE tahun 2025 mampu mempertahankan target dengan realisasi sebesar 2,8 dari target sebesar 2,8 dengan persentase capaian sebesar 100%. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun dalam masa transisi kepemimpinan, komitmen terhadap digitalisasi birokrasi tetap terjaga melalui keberlanjutan infrastruktur dan standarisasi layanan.

Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika akan melaksanakan Integrasi layanan publik ke dalam satu portal, atau yang sering disebut sebagai **Portal Administrasi Pemerintahan** dimana akan dilakukan upaya untuk menyatukan berbagai layanan digital yang sebelumnya terpisah-pisah (terfragmentasi) di berbagai instansi ke dalam satu pintu akses tunggal. Dalam konteks **SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)**, ini bukan sekadar membuat website baru yang berisi kumpulan link, melainkan integrasi mendalam secara sistem.

Portal Administrasi Pemerintahan meningkatkan **aksesibilitas yang inklusif**. Dengan satu portal, kelompok perempuan, ibu rumah tangga, dan kelompok rentan lainnya yang memiliki keterbatasan waktu (beban ganda) dapat mengurus berbagai keperluan administratif (seperti akta kelahiran, bantuan sosial, dan layanan kesehatan) dalam satu waktu dan satu tempat secara digital, tanpa harus meninggalkan rumah atau mengantre di banyak kantor dinas."

Sasaran Kinerja 2 yaitu Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik dengan Indikator Indeks keterbukaan Informasi Publik terealisasi sebesar 48,5 dari target yang ditetapkan 60 dengan capaian 80,8%. Skor ini masih belum memenuhi target yang ditetapkan dalam dokumen transisi RPJMD.

Belum terpebuhinya Indeks Keterbukaan Informasi Publik pada masa transisi ini dipandang sebagai **fase kalibrasi**. Diskominfo berkomitmen menjadikan ini sebagai momentum untuk melakukan audit total terhadap SOP layanan informasi publik, guna memastikan bahwa pada tahun kedua RPJMD 2025-2029, indeks keterbukaan publik kembali meningkat dengan standar keamanan data yang lebih kuat sesuai regulasi terbaru."

Meskipun target indeks secara kuantitatif belum terpenuhi, dari sisi kualitas, layanan informasi tetap mengedepankan prinsip inklusivitas. Diskominfo telah memastikan bahwa kanal permohonan informasi tetap aksesibel bagi kelompok perempuan dan penyandang disabilitas. Fokus ke depan adalah meningkatkan ketersediaan **Data Terpilah Gender** yang lebih lengkap guna mendukung pencapaian target di tahun mendatang."

Sasaran Kinerja 3 yaitu Meningkatnya Kualitas Statistik Sektorial dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik dengan target 2,8 (Baik) dengan realisasi 2,8 (baik) dengan capaian 100%.

Capaian ini memenuhi target penyesuaian RPJMD sebesar **2.8**. Meskipun berada dalam fase transisi perencanaan, konsistensi dalam penyelenggaraan statistik sektorial tetap terjaga melalui kolaborasi antara Diskominfo sebagai Wali Data dan BPS sebagai Pembina Data.

Pencapaian Indeks Pembangunan Statistik di awal periode RPJMD ini menjadi fondasi bagi **Decision Support System** berbasis data. Ke depan, fokus akan diarahkan pada peningkatan kualitas data dari level 'Tersedia' menjadi 'Bisa Dibagipakaikan' (Interoperable), guna memastikan setiap kebijakan daerah didasarkan pada data yang valid dan mutakhir.

## B. REALISASI ANGGARAN

Realisasi Anggaran kegiatan dapat dilihat dari realisasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 di Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pada Tahun 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk total realisasi belanja adalah 92,38 %.

Berikut adalah realisasi program dan kegiatan pada tahun anggaran 2025 :

Program/Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>11.179.214.501,00</b>	<b>10.326.946.316,00</b>	<b>851.978.445,00</b>	<b>92,38</b>
<b>PROGRAM PENUJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>5.132.502.861,00</b>	<b>4.606.371.972,00</b>	<b>526.023.219,00</b>	<b>89,75</b>
<b>KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>	<b>41.275.298,00</b>	<b>40.594.692,00</b>	<b>680.606,00</b>	<b>98,35</b>
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.847.514,00	7.679.000,00	168.514,00	97,85
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	7.299.027,00	7.205.000,00	94.027,00	98,65
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA SKPD	4.098.783,00	3.961.000,00	137.783,00	96,64
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	6.435.342,00	6.416.800,00	18.542,00	99,71
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA Perubahan SKPD	5.688.978,00	5.654.700,00	34.278,00	99,44
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.952.047,00	3.779.392,00	172.655,00	95,64
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.953.607,00	5.898.800,00	54.807,00	99,08
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>4.209.273.075,00</b>	<b>3.819.275.477,00</b>	<b>389.997.598,00</b>	<b>90,73</b>



Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.955.303.389,00	3.568.251.477,00	387.051.912,00	90,21
Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	219.720.000,00	216.840.000,00	2.880.000,00	98,71
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	19.560.000,00	19.560.000,00	00,00	100,00
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	6.045.972,00	6.041.900,00	4.720,00	99,91
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Ananlisi Prognosis Realisasi Anggaran	8.643.714,00	8.582.100,00	61.614,00	99,29
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800.000,00</b>	<b>0,00</b>
Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00
<b>KEGIATAN ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	<b>223.316.567,00</b>	<b>183.838.459,00</b>	<b>39.370.438,00</b>	<b>82,32</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.512.195,00	5.504.883,00	7.312,00	99,87
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	33.813.870,00	33.151.200,00	555.000,00	98,00
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.889.800,00	3.889.800,00	0,00	100,00
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.009.544,00	14.005.092,00	4.452,00	99,97
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20.197.358,00	20.181.700,00	15.658,00	99,92
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan	50.000.000,00	14.496.000,00	35.504.000,00	28,99
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.800.000,00	4.790.000,00	10.000,00	99,79
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	91.093.800,00	87.819.784,00	3.274.016,00	96,41



<b>KEGIATAN PENGADAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>126.272.700,00</b>	<b>120.152.700,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>95,19,00</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	<b>126.272.700,00</b>	<b>120.152.700,00</b>	<b>6.120.000,00</b>	<b>95,19,00</b>
Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	272.700,00	272.700,00	0,00	100,00
<b>KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PENJUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>208.522.120,00</b>	<b>194.406.294,00</b>	<b>14.115.826,00</b>	<b>93,23</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan	17.530.600,00	9.557.955,00	7.972.645,00	54,52
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	190.991.520,00	184.848.339,00	6.143.18100	98,78
<b>KEGIATAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>305.843.101,00</b>	<b>248.104.350,00</b>	<b>57.738.751,00</b>	<b>81,12</b>
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.028.000,00	42.171.000,00	4.857.000,00	89,67
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	245.145.000,00	192.263.250,00	52.881.750,00	78,42
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12.675.901,00	12.675.900,00	1,00	100,00
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	994.200,00	994.200,00	0,00	100,00
<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>	<b>2.797.508.242,00</b>	<b>2.757.320.900,00</b>	<b>40.005.272,00</b>	<b>98,58</b>
<b>KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.797.508.242,00</b>	<b>2.757.320.900,00</b>	<b>40.005.272,00</b>	<b>98,56</b>
Sub Kegiatan Relasi Media	2.049.609.353,00	2.040.105.100,00	9.504253,00	99,54
Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	3.928.077,00	3.896.000,00	32.077,00	99,18
Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik	211.137.348,00	204.880.800,00	6.256.549,00	97,04



Sub Kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi	78.685.631,00	66.453.600,00	10.049.961,00	86,66
Sub Kegiatan Diseminasi Informasi	321.731.094,00	308.307.200,00	13.423.894,00	95,83
Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi PublikKomunikasi	134.416.738,00	133.678.200,00	738.538,00	99,45
<b>PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>2.903.572.937,00</b>	<b>2.705.519.771,00</b>	<b>218.053.156,00</b>	<b>92,54</b>
<b>KEGIATAN PENGELOLAAN NAMA DOMAIN YANG TELAH</b>	<b>129.873.950,00</b>	<b>125.708.760,00</b>	<b>4.165.190,00</b>	<b>96,79</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desadan Sub Domain Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	129.873.950,00	125.708.760,00	4.165.190,00	96,79
<b>KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.793.698.987,00</b>	<b>2.579.811.011,00</b>	<b>213.887.976,00</b>	<b>92,34</b>
Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi	11.557.700,00	11.142.400,00	415.300,00	96,41
Sub Kegiatan Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	640.717.710,00	504.869.677,00	135.848.033,00	78,80
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan PemerintahPemerintah Daerah	30.948.432,00	25.927.400,00	5.021.032,00	83,78
Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE Pemerintah Daerah	145.640.848,00	136.596.025,00	9.044.823,00	93,79
Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau kota Cerdas	16.447.181,00	6.376.450,00	10.070.731,00	38,77
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	501.526.587,00	493.978.395,00	7.548.192,00	98,49
Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE	1.446.860.529,00	1.400.920.664,00	45.939.865,00	96,82



<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>186.521.395,00</b>	<b>172.977.170,00</b>	<b>13.544.225,00</b>	<b>92,74</b>
<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI</b>	<b>186.521.395,00</b>	<b>172.977.170,00</b>	<b>13.544.225,00</b>	<b>92,74</b>
Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	53.177.976,00	39.997.900,00	13.180.076,00	75,22
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data	133.343.419,00	132.979.270,00	364.149,00	99,73
<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>	<b>139.109.066,00</b>	<b>84.756.503,00</b>	<b>54.352.563,00</b>	<b>60,93</b>
<b>KEGIATAN PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH</b>	<b>139.109.066,00</b>	<b>84.756.503,00</b>	<b>54.352.563,00</b>	<b>60,93</b>
Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	47.976.229,00	44.810.000,00	3.166.229,00	93,40
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	91.132.837,00	39.946.503,00	51.186.334,00	43,83



No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	% Capaian
1.	<b>Sasaran Strategis 1</b> <b>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab</b>						
	Indikator Kinerja Sasaran Indeks SPBE	2.923.572.937,00	2.705.519.771,00	92,48 %	2,8	2,8	100,00 %
	<b>Program 1</b> <b>Program Pengelolaan Aplikasi Informatika</b>	2.923.572.937,00	2.705.519.771,00	92,48 %	100 %	100 %	100 %
	Indikator Kinerja Program Persentase PD yang e-GOVnya terintegrasi						
	<b>Kegiatan 1.1</b> <b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	129.873.950,00	2.705.519.771,00	92,48 %	315 PD	315 PD	100%
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya PD yang telah menggunakan Domain dan Sub Domain resmi						
	Indikator Kegiatan Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan Subdomain Resmi						
	Rencana Operasional 315 PD						



<b>Kegiatan 1.2</b> <b>Kegiatan Pengelolaan E-Government Di</b> <b>Lingkup Pemerintah Daerah</b> <b>Kabupaten/Kota</b>	2.793.698.987,00	2.579.811.011,00	92,29 %	5 PD	3 PD	60 %
Sasaran Kegiatan Meningkatnya Aplikasi Terintegrasi						
Indikator Kegiatan Jumlah PD yang Aplikasinya Terintegrasi						
Rencana Operasional 5 PD						
<b>Program 2</b> <b>Program Penyelenggaraan Persandian</b> <b>Untuk Pengamanan Informasi</b>	139.109.066,00	84.756.503,00	60,89	245	25	3,87%
Indikator Kinerja Program Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah						



	<b>Kegiatan 2.1 Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	139.109.066,00	84.756.503,00	60,89	51	359	703%
	Sasaran Kegiatan Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						
	Indikator Kegiatan Jumlah Sertifikat Elektronik yang diterbitkan						
	Rencana Operasional 25 Sertifikat						
2.	<b>Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik</b>						
	Indikator Kinerja Sasaran Indkes Keterbukaan Informasi Publik (KIP)						
	Program 2.1 <b>Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik</b>	2.797.508.242,00	2.757.320.900,00	98,59 %	100 %	83,20%	83,20%
	Indikator Kinerja Program Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota						



	<b>Kegiatan 1</b> <b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi</b> <b>Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	2.797.508.242,00	2.757.320.900,00	98,59 %	1000	1429	142,9%
	Sasaran Kegiatan Meningkatnya Informasi Publik yang tersampaikan						
	Indikator Kegiatan Jumlah informasi publik yang tersampaikan						
	Rencana Operasional 1000 informasi						
3.	<b>Sasaran Strategis 3</b> <b>Meningkatnya Kualitas Data Statistik</b> <b>Sektoral</b>						
	Indikator Kinerja Sasaran Indeks Pembangunan Statisti (IPS)	186.521.395,00	172.977.170,00	92,7	2,8	2,8	10,00
	Program 3.1 <b>Program Penyelenggaraan Statistik</b> <b>Sektoral</b>	186.521.395,00	172.977.170,00	92,7	50%	33,28%	100%
	Indikator Kinerja Program Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah						



Kegiatan 1 <b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	186.521.395,00	172.977.170,00	92,7	530	403	76,04
Sasaran Kegiatan Meningkatnya data statistik sektoral yang dipublikasikan						
Indikator Kegiatan Jumlah data statistik sektoral yang dipublikasikan						
Rencana Operasional 530 Data						



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta sumber daya manusia dan dana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2025 dan tindak lanjut dari Instruksi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Revisi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur selama tahun 2025.

Berdasarkan evaluasi kinerja, nilai capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur pada tahun anggaran 2025 dikategorikan berhasil, karena program dan kegiatan terealisasi sebesar 92,38 %.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun dengan harapan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah menjadi bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung Timur dan menjadi acuan dalam upaya perbaikan kinerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Timur pada masa-masa mendatang.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Buay Anak Tuha Kompleks Perkantoran Sukadana, Lampung Timur 34194  
Ig: diskominfo-lam-tim; Fb:Dinas Kominfo Lampung Timur;  
Pos-el (E-mail) [diskominfoLAMTIM23@yahoo.com](mailto:diskominfoLAMTIM23@yahoo.com); Laman: <http://www.lampungtimurkab.go.id>

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MANSUR SYAH,S.Sos., M.IP.

Jabatan : KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ELA SITI NURYAMAN

Jabatan : BUPATI LAMPUNG TIMUR

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sukadana, 8 September 2025

Pihak Kedua,

  
Ela Siti Nuryamah

Pihak Pertama,

  
Mansur Syah,S.Sos., M.IP.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721018 200003 1 006

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Implementasi e-Government	Indeks Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Baik 2,8
2.	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Cukup Informatif 60
3.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Baik 2,8

**PROGRAM**

**ANGGARAN**

1.	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah kabupaten/kota.	Rp	5.132.502.861,00
2.	Program Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp	2.797.508.242,00
3.	Program Aplikasi Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Rp	2.923.572.937,00
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.	Rp	186.521.395,00
5.	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.	Rp	139.109.066,00

Bupati Lampung Timur,

  
Ela Siti Nuryamah

Sukadana, 8 September 2025

Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika,

  
Mansur Syah, S.Sos., M.IP